

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 3 No. 1 (Januari-Juni 2021)

Perjuangan Ken Arok Menjadi Raja Kerajaan Singosari Tahun 1222-1227

Agus Susilo, Sarkowi

Pengaruh Model Pembelajaran *Time Token* terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Qur'aniah 1 Palembang

Hesti Rahayu, Dina Sri Nindiati

Raden Mattaher sebagai Tonggak Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Jambi

Nirwan II Yasin, Miftahul Jannah

Pergulatan Tradisi, Agama, Negara: Analisis Sosio-Kultural Keturunan Tionghoa dan Perkembangan Gereja Tionghoa Indonesia (1950-1999)

Samudra Eka Cipta

Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama di Indonesia

Teguh Dias Arestu

Perbedaan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran *Pair Check* dan *Cooperative Script* pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 41 Rejang Lebong

Elva Susanti, Isbandiyah, Sarkowi

Perkembangan Pesantren di Indonesia

Bella Almira, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita

Pengaruh Penaklukan Konstantinopel terhadap Kemajuan Turki Usmani Tahun 1453 (Kajian Politik Ekspansi Sultan Muhammad Al-Fatih)

Rulianto, Altin Dokopati

Situs Sendang Duwur di Kabupaten Lamongan Jawa Timur

Izza Ainun Nurkholishoh, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nirmala Puji

Tempat Bersejarah di Alas Ketonggo Srigati Ngawi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya

Dian Rahma Nur Afifah



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2021)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Perjuangan Ken Arok Menjadi Raja Kerajaan Singosari Tahun 1222-1227 <i>Agus Susilo, Sarkowi</i>	1
2. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Time Token</i> terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Qur'aniah 1 Palembang <i>Hesti Rahayu, Dina Sri Nindiati</i>	11
3. Raden Mattaher sebagai Tonggak Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Jambi <i>Nirwan II Yasin, Miftahul Jannah</i>	17
4. Pergulatan Tradisi, Agama, Negara: Analisis Sosio-Kultural Keturunan Tionghoa dan Perkembangan Gereja Tionghoa Indonesia (1950-1999) <i>Samudra Eka Cipta</i>	25
5. Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Pertama di Indonesia <i>Teguh Dias Arestu</i>	37
6. Perbedaan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran <i>Pair Check</i> dan <i>Cooperative Script</i> pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 41 Rejang Lebong <i>Elva Susanti, Isbandiyah, Sarkowi</i>	42
7. Perkembangan Pesantren di Indonesia <i>Bella Almira, Yunani Hasan, Aulia Novemy Dhita</i>	52
8. Pengaruh Penaklukan Konstantinopel terhadap Kemajuan Turki Usmani Tahun 1453 (Kajian Politik Ekspansi Sultan Muhammad Al-Fatih) <i>Rulianto, Altin Dokopati</i>	62
9. Situs Sendang Duwur di Kabupaten Lamongan Jawa Timur <i>Izza Ainun Nurkholishoh, Wiwin Hartanto, Rully Putri Nurmala Puji</i>	69
10. Tempat Bersejarah di Alas Ketonggo Srigati Ngawi dan Nilai Budaya yang Terkandung di dalamnya <i>Dian Rahma Nur Afifah</i>	82

BENTUK PELAKSANAAN DEMOKRASI PERTAMA DI INDONESIA

Teguh Dias Arestu

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Alamat korespondensi: diasteguh52@gmail.com

Diterima: 9 Mei 2020; Direvisi: 3 November 2020; Disetujui: 2 Desember 2020

Abstract

Liberal democracy began when Indonesia held a session at the KMB forming a parliamentary. With the ongoing cabinet, the policy pattern depends on the prime minister in charge of his time. For example, the cabinet of Burhanudin Harentuk which made the work program for the first election in Indonesia so that it shocked many surrounding countries

Keywords: *Implementation, Democracy, Indonesia.*

Abstrak

Demokrasi liberal bermula Ketika Indonesia telah melakukan sidang di KMB membentuk parlementer. Dengan berlangsungnya kabinet maka pola kebijakan tergantung dari perdana menteri yang menguasai pada masanya. Seperti kabinet burhanudin harahap yang membuat program kerja pemilu pertama di Indonesia sehingga mengemparkan banyak negara sekitar

Kata Kunci: Pelaksanaan, demokrasi, Indonesia.

A. Pendahuluan

Melalui putusan bahwa sistem pemerintahan Indonesia pasca proklamasi yang bertepatan setelah sidang KMB di mana pengesahan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Adanya kedaulatan yang dimaksud menjadikan menjadikan kekuasaan Indonesia telah seutuhnya dikelola oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Sebab demiklah pemerintahan Indonesia perlu membuat sistem untuk mengatur negara. Dengan demikian bentuk negara Indonesia kembali pada NKRI dengan membentuk demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan (Matroji, 2002:66). Maka dari itu pemerintah membentuk sistem yang terkandung pada UUDS 1950 yakni kabinet parlementer di mana setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan sebagian besar dari parlemen (Medjanto, 1992:77).

Dengan adanya sistem parlementer ini, Indonesia melakukan kebijakan demokrasi liberal yang berjarak antara 1950-1959 dengan diawali Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman(April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953), Kabinet Ali I (Juli 1953-Agustus1955), Kabinet Burhannudin (Agustus 1955- Maret 1956) Kabinet Ali II (1956-1957) dan Kabinet Djuanda (1957- 1959) (Zulkarnian, 2012:104). Dari berbagai kebijakan setiap kabinet saat berjalanya pemerintahan kabinet tidak liput dengan timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah NKRI. Permasalahan yang terjadi tidak hanya meliputi faktor pada sistem pemerintahan yang tampak pada dijalankannya demokrasi liberal yang banya mendirikan berbagai partai. Oleh karena setiap partai politik memperjuangkan kepentingan partai sehingga menjatuhkan partai lain yang mengakibatkan pergulingan kabinet. Di sisi luar pemerintahan timbul

pergolakan tentang ketahanan negara seperti masalah gangguan keamanan dalam negeri. (Poesponegoro, 2010). Berfokus pada masa kabinet Burhanudin tentang pemilu pertama di Indonesia. Keinginan akan pemilu sudah ada sejak tiga bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Hingga sistem demokrasi liberal pemilu dapat dilaksanakan pada tahun 1955 tanggal 29 September dan 15 Desember. Pemilu 1955 bahkan mendapatkan pujian dari berbagai pihak hingga negara asing. Karena negara yang baru saja merdeka sudah melaksanakan sistem demokrasi melalui tingginya kesadaran berkompetisi dengan sehat. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji bagaimana keadaan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan yang biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian (Suryana, 2010). Penggunaan metode penelitian dilakukan untuk memahami peristiwa sejarah dan masalah yang dihadapi dalam sidang Konferensi Meja Bundar

Dalam pencarian sumber sejarah peneliti menggunakan metode penulisan deskriptif. Suryana (2010) menjelaskan metode deskriptif atau mendeskripsikan merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur, ciri-ciri, dan sifat suatu fenomena yang ada. Dengan demikian pemahaman tentang kabinet burhanudin perlu mencari pentingnya pola kebijakan yang sedang terjadi.

C. Pembahasan Konsepsi Demokrasi dengan Bentuk Pemilu 1955

Pemilihan umum merupakan bentuk dari proses pemilihan orang-orang yang mengisi tanggung jawab dalam sebuah jabatan. Penserahan jabatan yang sah yakni lelai pemungutan suara dengan cara proses penghitungan dimulai. Sehingga suara terbanyak dapat ditetapkan terpilihnya sebuah serah jabatan oleh kandidat yang memiliki suara terbanyak. Menurut UU no 08 tahun 2009 pasal 1 Pemilu yakni sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjelaskan sejarah pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara demokrasi. Pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat di mana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Hadi, Wiyono, 2007:101). Bentuk dari demokrasi ini yakni pemilu yang bertujuan untuk menampung aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Mekanisme politik dalam pemilu yakni dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka melewati partai politik yang terdapat kandidat dari masing-masing parpol (Maarif, 1996:41). Berbicara tentang keberadaan pemilu tercatat di karesidenan Kediri dan Surakarta yang cakupannya lokal sedangkan skala nasional masih belum bisa teralisasi (Feith, 1999:2). Pemilu terdapat pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan dewan konstituante. Pemilihan anggota tersebut tercatat dalam UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum. Konteks pemilu ini terdapat dalam sistem ketatanegaraan kabinet parlementer dengan sistem multi partai.

Berlangsungnya pemilu 1955 dengan sistem proposional yang dikombinasikan dengan sistem daftar di mana 30 lebih partai memiliki wakil dari berbagai daerah. Oleh sebab tersebut lah dengan banyaknya partai ini mengakibatkan rakyat memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pemilu seperti yang terkandung dalam pasal 35 UUDS 1950 yakni kemauan dalam pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan bersifat umum dan berkesamaan yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara. Pasal ini memerintahkan dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu (Ibrahim, 1981:79).

Kabinet Burhanuddin Sang Pelaksana Pesta Demokrasi

Prestasi suksesi kabinet Burhanudin menunjukkan pada tercapainya pemilu yang demokratis yang mengakibatkan Indonesia unggul dalam diplomasi perjuangan Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia (Hakiki, 2014). Pada kabinet sebelumnya Ketika demokrasi parlementer sejak 1950 yang mencontoh masa demokrasi liberal. Indonesia kala itu mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan ketidak stabilan hingga berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer, tapi tanpa parlemen yang sesungguhnya sampai diselenggarakannya pemilihan umum pertama tahun 1955 (Maarif, 1996:198). Sebelum Kabinet Burhanudin kebijakan pemilu sebenarnya sudah direncanakan pada kabinet sebelumnya. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 terjadi ketidak setabilan tatanan negara. Adapun kabinet Ali merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan Umum (Poesponegoro dkk, 1993:526). Namun kabinet ini tidak berlangsung lama karena keadaan politik yang tidak

setabil. Sebenarnya situasi politik yang tidak setabil di Indonesia dialihkan pada suatu peristiwa yang dikatakan mampu mengangkat nama Indonesia (Kunto, 1996:288). Sehingga banyak peristiwa yang mendorong dan mempercepat adanya pemilu 1955 yakni peristiwa 17 Oktober 1952 yakni terjadinya demonstrasi di depan istana Negara dan pengrusakan gedung parlemen oleh para demonstran dengan tujuan meminta pembubaran parlemen (Suhadi, 1981:6)

Penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 31 Juli 1954, panitia pemilihan umum pusa terbenuk yang diketuai oleh Hadikusumo. Pelaksanaan pemilu membentuk badan penyelenggaraan yang dinamakan panitia dari setiap daerah di Indonesia. Paniti tersebut pada awalnya terdiri atas pejabat pemerintahan yang dibantu parati politik dengan tanggung jawab oleh menteri dalam negeri (Suhadi, 1981:22). Sebenarnya kepanitian pemilu sudah dibentuk semenjak kabinet wilopo namun dapat terealisasikan pada kabinet Burhanudin ini. Pada pemilu 1955 tidak memilih badan eksekutif pemerintah, namun badan eksekutif ini hanya bertindak sebagai penanggung jawab. Adapun peserta yang berpartisipasi dalam pemilu yakni Parpol 36, organisasi 34, perorangan 48 untuk memilih Anggota DPR. Sedangkan untuk memilih anggota Konstituasi terdiri atas Parpol 39, organisasi 23, perorangan sebanyak 29. Secara garis besar tergolong menjadi partai besar hingga partai menengah baik nasional maupun cakupanya daerah.

Seluk Beluk Pemilu 1955

Kampanye merupakan tahapan yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kampanye pemilu 1955 bermula sejak tahun 1953 sampai tahun pemilihan

yakni 2 tahun hingga kabinet Ali I. Bentuk kampanye yang dilakukan yakni bersuasana tentang perluasan pengaruh ideologi dari masing masing partai guna memberi solusi tentang masalah dasar negara. Tanggal 31 Mei 1955 dianggap awal kampanye ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia pemilihan Indonesia (Feith, 1999:10).



Gambar 1 Bendera partai politik
(sumber: Google/10 foto jadul pemilu)

Pada berlangsungnya kampanye nama partai yang dipilih menonjolkan kandidat sesuai urutan nama mereka. Oleh sebab itu setiap partai besar seperti PKI, Masyumi, dan PSI menonjolkan ciri khas kepartainya dari pribadi pemimpin yang akan dijadikan sebagai pemimpin kelak. Prosedur pencalonan yang mudah tanpa adanya Batasan daftar pencalon mendorong banyak yang tidak mungkin akan terpilih. Hal inilah yang mengakibatkan pemenang dari calon yang terpilih hanya orang terpenting dari kelompok tersebut. Metode pelaksanaan kampanye beragam dari berbagai partai yang ada di daerah-daerah. Pertemuan antara calon dan masyarakat diselenggarakan dari berbagai tingkat lapisan daerah seperti alun-alun kota hingga balai desa dengan pembicara dari anggota partai yang bersangkutan. Kala itu demi pemilihan umum banyak orang yang senang hati berjalan kaki sejauh lima kilometer atau lebih untuk menuju ke tempat pemungutan suara. Terdapat pula para

oaring yang akan ke tempat pemilihan umum naik perahu (Wardaya, 2004:12).

Setelah parade kampanye dan pemilihan telah berlangsung hasil pemilihan umum pertama pada tahun 1955 sangat menarik perhatian masyarakat terutama ahli hukum Tata Negara baik dalam maupun luar negeri karena pengaruh besar terhadap kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum tahun 1955 di Indonesia sangat menarik dan merupakan suatu eksperimen dalam pelaksanaan demokrasi menarik perhatian mengenai mekanisme politik yang menentukan dasar politik di Indonesia serta bahan analisa masyarakat (Suhadi, 1981:26). Dari hasil pemilihan umum tercatat lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Pemungutan suara tepat pada 29 September dapat sekurangnya 85% dari lebih kurang 93% tempat pemungutan suara dan diselesaikan seluruhnya pada 29 November (Feith, 1999:57). Tidak dapat dipungkiri semua tempat pemilu berjalan secara mulus, khususnya di tempat-tempat yang jalur komunikasi dan transportasinya belum lancar. Tetapi setelah pemilu terlaksanan tekanan politisi maupun psikologis menurun drastis. Rakyat dengan bebas menentukan pemilihan mereka pada akhirnya nasib tidak lagi ditentukan oleh faktor luar. Pada umumnya maskarayat merasa bangga bahwa mereka baru saja ikut berperan serta dalam momen bersejarah menentukan masa depan bangsa (Wardaya, 2004:12).

Akibat pemilihan umum ini menambahkan kursi partai politik di DPR yang membuat partai politik tidak memperoleh wakil secara mayoritas. Sebab tersebutlah terpaksa membentuk koalisi dari berbagai macam parpol. Ditinjau dari sudut pandang pelaksanaan pemilu semua pihak

merasa telah dilaksanakan secara tertulis seperti kampanye sampai pemberitahuan suara. Namun nyatanya banyak yang terjadi aksi ketidakjujuran akibat melanggar hak asasi warga negara (Ibrahim, 1981:89). Berkacamata stabilisasi politik, dan kenyataan ini menimbulkan kekecewaan yang besar terhadap Lembaga-lembaga politik yang ada. Hingga kalangan militer terutama Angkatan darat menanggapi karena mengakibatkan negara dalam bahaya perpecahan. Alasan ini dikarenakan negara sedang menghadapi masalah keamanan yang berat.

D.Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan bentuk dari proses pemilihan orang-orang yang mengisi tanggung jawab dalam sebuah jabatan. Penserahan jabatan yang sah yakni lelai pemungutan suara dengan cara proses penghitungan dimulai. Sehingga suara terbanyak dapat ditetapkan terpilihnya sebuah serah jabatan oleh kandidat yang memiliki suara terbanyak. Pemilihan umum merupakan bentuk dari proses pemilihan orang-orang yang mengisi tanggung jawab dalam sebuah jabatan. Penserahan jabatan yang sah yakni lelai pemungutan suara dengan cara proses penghitungan dimulai. Sehingga suara terbanyak dapat ditetapkan terpilihnya sebuah serah jabatan oleh kandidat yang memiliki suara terbanyak. Pemilu terdapat pada tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR dan dewan konstituante. Kampanye merupakan tahapan yang dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Tetapi setelah pemilu terlaksanan tekanan politisi maupun psikologis menurun drastis. Rakyat dengan bebas menentukan pemilihan mereka pada akhirnya nasib tidak lagi ditentukan oleh factor luar.

Daftar Referensi

Moedjanto, G. 1992. *Indonesia Abad 20 Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius
Matroji. 2002. *Sejarah*. Jakarta : Erlangga

Noer, D. 1987. *Partai Islam Di Tengah Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Press.
Poesponegoro. 2010. *SNI Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustak
Redaksi Great Publisher. 2009. *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: GalangPress
Simanjuntak, P. N. H. 2003. *Kabinet-Kabinet Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan
Suprpto, B. 1985, *Perkembangan Kabinet dan pemerintahan di Indonesia,,* Jakarta: Ghalia Indonesia
Suryana. 2010. *Metodoologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif*. Bandung:UPI
Zulkarnain. 2012. *Jalan meneguhkan Negara : Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pujangga Press
Hakiki, P., 2014, *Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959* – PhD thesis, Riau University .
Maarif, A. S. 1996 . *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press
Herbert, F. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia,* a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
Kunto, H. 1996. *Balai Agung di Kota Bandung*. Bandung: Granesia.
Suhadi, I. 1981. *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.